

Kesenjangan antara Target dan Realisasi: Studi Indikator Pembangunan Kalurahan dan Kelurahan DIY 2025

Juang Gagah Mardhika

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Email Korespondensi: juanggagahmardhikastpmdapmd@gmail.com

Abstrak: Pembangunan daerah merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Meskipun Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan berbagai capaian pembangunan yang positif, sejumlah indikator pembangunan di tingkat kalurahan dan kelurahan masih belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025. Kondisi tersebut tercermin dari masih tingginya angka kemiskinan, belum optimalnya capaian Inclusive Growth Index (IGI), ketimpangan antarwilayah, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar bagi sebagian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi indikator pembangunan yang belum mencapai target, menganalisis tingkat capaiannya berdasarkan data empiris, mengkaji faktor-faktor penyebab ketidaktercapaian, serta merumuskan strategi peningkatan efektivitas pembangunan di tingkat kalurahan dan kelurahan di DIY. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi dokumen terhadap berbagai sumber data sekunder, seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY Tahun 2025, data statistik pembangunan daerah, serta berbagai dokumen kebijakan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidaktercapaian indikator pembangunan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur, lemahnya koordinasi antaraktor pembangunan, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan infrastruktur dasar, serta faktor struktural berupa keterbatasan anggaran dan dinamika ekonomi eksternal. Ketidaktercapaian indikator tersebut berimplikasi pada masih tingginya kemiskinan multidimensional, ketimpangan pembangunan wilayah, dan belum optimalnya kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola pembangunan melalui perencanaan berbasis data, peningkatan kapasitas kelembagaan kalurahan dan kelurahan, penguatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Kajian ini memberikan kontribusi dalam memahami tantangan pembangunan di tingkat lokal sekaligus menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: pembangunan daerah, kalurahan, kelurahan, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Abstract: Regional development is an important instrument in improving community welfare through an inclusive, equitable, and sustainable approach. Although the Special Region of Yogyakarta (DIY) has shown various positive development achievements, a number of development indicators at the sub-district and sub-district levels have still not reached the target set for 2025. This condition is reflected in the still high poverty rate, the lack of optimal achievement of the Inclusive Growth Index (IGI), inequality between regions, and limited access to basic services for some people. This study aims to identify development indicators that have not reached the target, analyze the level of achievement based on empirical data, examine the factors that cause non-achievement, and formulate strategies to increase the effectiveness of development at the sub-district and sub-district levels in Yogyakarta. The research method used is qualitative descriptive analysis with a document study

approach to various secondary data sources, such as the 2025 Yogyakarta Governor's Accountability Report (LKPI), regional development statistical data, and various related policy documents. The results of the study show that the non-achievement of development indicators is influenced by various factors, including the limited capacity of human resources of the apparatus, weak coordination between development actors, low community participation, limited basic infrastructure, and structural factors in the form of budget limitations and external economic dynamics. The non-achievement of these indicators has implications for the still high level of multidimensional poverty, inequality in regional development, and the suboptimal quality of life of the community. Therefore, it is necessary to strengthen development governance through data-based planning, increase the institutional capacity of villages and sub-districts, strengthen community participation, and develop development policies that are more inclusive and responsive to local needs. This study contributes to understanding development challenges at the local level as well as being the basis for the formulation of more effective and sustainable development policies.

Keywords: regional development, sub-districts, sub-districts, Special Region of Yogyakarta.

Article History :

Received 20-05-2026; Revised 02-06-2026; Accepted 20-06-2026

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan suatu proses yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam paradigma pembangunan modern, pembangunan tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai peningkatan output ekonomi, melainkan sebagai suatu proses transformasi sosial yang mencakup peningkatan kualitas hidup manusia, pemerataan hasil pembangunan, pengurangan kemiskinan, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dengan memperhatikan berbagai dimensi, baik ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, maupun tata kelola pemerintahan. Dalam konteks desentralisasi di Indonesia, pembangunan daerah menjadi semakin penting karena pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber daya dan menentukan arah kebijakan pembangunan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Desentralisasi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pembangunan melalui pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Namun demikian, keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu daerah yang memiliki keunikan dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagai daerah yang memiliki status keistimewaan, DIY tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pelestarian budaya, penguatan nilai-nilai sosial, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. DIY dikenal sebagai pusat pendidikan dan budaya, namun di sisi lain masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang cukup kompleks, seperti kemiskinan, ketimpangan wilayah, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Salah satu isu utama dalam pembangunan di

DIY adalah belum optimalnya pemerataan hasil pembangunan. Meskipun secara umum pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, manfaat dari pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini tercermin dari masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya bersifat inklusif.

Konsep pembangunan inklusif menjadi sangat penting dalam menjawab tantangan tersebut. Pembangunan inklusif menekankan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan memperoleh manfaat dari hasil pembangunan tersebut. Dalam hal ini, indikator *Inclusive Growth Index (IGI)* digunakan untuk mengukur sejauh mana pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan pemerataan dan mengurangi kemiskinan. Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY Tahun 2025, capaian IGI DIY sebesar 5,90 dari target 6,52 atau sekitar 90,49%. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi, distribusi manfaatnya masih belum merata. Kelompok masyarakat tertentu, terutama yang berada di wilayah pedesaan atau kalurahan, masih belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan. Selain itu, angka kemiskinan di DIY juga masih berada di atas target yang ditetapkan. Realisasi sebesar 10,08% menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang hidup dalam kondisi rentan secara ekonomi. Kemiskinan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Dengan demikian, kemiskinan di DIY dapat dikategorikan sebagai kemiskinan multidimensional yang memerlukan penanganan secara terpadu.

Permasalahan kemiskinan juga berkaitan erat dengan ketimpangan wilayah. Indikator seperti Indeks Williamson menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas pembangunan antar wilayah di DIY. Wilayah perkotaan cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap infrastruktur dan layanan publik dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan dalam kualitas hidup masyarakat antara wilayah satu dengan yang lainnya. Dalam konteks ini, kalurahan dan kelurahan memiliki peran yang sangat penting dalam menjembatani kebijakan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. Kalurahan sebagai entitas pemerintahan desa di DIY memiliki kewenangan yang cukup luas dalam mengelola pembangunan berbasis masyarakat. Hal ini memberikan peluang bagi kalurahan untuk mengembangkan program-program yang sesuai dengan kondisi lokal. Namun demikian, pelaksanaan pembangunan di tingkat kalurahan dan kelurahan masih menghadapi berbagai kendala.

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Aparatur kalurahan seringkali dihadapkan pada berbagai tuntutan administratif dan teknis yang memerlukan kompetensi tertentu. Keterbatasan kapasitas ini dapat mempengaruhi kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, permasalahan koordinasi antar perangkat juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas pembangunan. Koordinasi yang kurang baik dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih program serta kurangnya

sinergi antar sektor. Hal ini pada akhirnya berdampak pada rendahnya capaian indikator pembangunan. Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Meskipun secara formal mekanisme partisipasi telah tersedia, seperti melalui musrenbang, dalam praktiknya partisipasi masyarakat masih terbatas. Hal ini dapat menyebabkan program pembangunan yang dilaksanakan kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur dasar juga menjadi tantangan yang signifikan. Meskipun capaian layanan dasar telah mencapai 97,20%, angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan akses yang memadai terhadap air bersih, sanitasi, dan hunian layak. Permasalahan ini lebih banyak terjadi di wilayah kalurahan yang memiliki keterbatasan sumber daya dan aksesibilitas. Selain faktor teknis dan administratif, faktor struktural juga turut mempengaruhi capaian pembangunan. Keterbatasan anggaran, rendahnya investasi, serta dinamika ekonomi global menjadi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang adaptif dan inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut. Lebih jauh lagi, ketidaktercapaian indikator pembangunan juga dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Ketimpangan yang tidak tertangani dapat memicu konflik sosial, sementara kemiskinan yang tidak tertangani dapat menghambat mobilitas sosial. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan capaian indikator pembangunan menjadi sangat penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, ketidaktercapaian indikator pembangunan juga menunjukkan perlunya peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem perencanaan berbasis data, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat mekanisme pengawasan. Dengan demikian, kajian mengenai pencapaian indikator pembangunan yang belum tercapai, khususnya pada tingkat kalurahan dan kelurahan, menjadi sangat penting untuk dilakukan. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang dihadapi serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, tulisan ini juga memiliki relevansi strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan pembangunan yang inklusif. Pada akhirnya, pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, mengurangi kesenjangan, serta menciptakan keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik, khususnya di tingkat kalurahan dan kelurahan sebagai garda terdepan pembangunan daerah.

Dilihat dari latarbelakang, maka peneliti merumuskan permasalahan yakni bagaimana identifikasi indikator pembangunan kalurahan dan kelurahan di DIY yang belum mencapai

target pada tahun 2025? Dan Strategi apa yang dapat dirumuskan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan di tingkat kalurahan dan kelurahan?

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah merupakan suatu proses yang terencana dan sistematis yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek pemerataan, keadilan sosial, serta keberlanjutan. Menurut Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, pembangunan merupakan proses multidimensional yang mencakup perubahan struktur sosial, peningkatan pendapatan, serta pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Hal ini diperkuat oleh temuan dalam jurnal pembangunan ekonomi yang menyatakan bahwa pembangunan daerah yang efektif harus mampu mengintegrasikan aspek ekonomi dan sosial secara simultan (Todaro & Smith, 2015). Selain itu, Lincolin Arsyad menekankan bahwa pembangunan daerah melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Studi dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusi lokal dan partisipasi masyarakat (Arsyad, 2010). Teori lain yang relevan adalah teori pertumbuhan dari Walt Whitman Rostow yang menyatakan bahwa pembangunan melalui tahapan-tahapan tertentu. Namun, pendekatan ini dikritik dalam berbagai jurnal karena terlalu menekankan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan distribusi (Cypher & Dietz, 2009). Sebagai alternatif, Amartya Sen melalui *Capability Approach* menyatakan bahwa pembangunan harus dipahami sebagai perluasan kebebasan manusia. Penelitian dalam jurnal *World Development* menunjukkan bahwa peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dibandingkan pertumbuhan ekonomi semata (Sen, 1999). Dengan demikian, pembangunan daerah harus dilihat sebagai proses yang komprehensif yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan Inklusif

Pembangunan inklusif merupakan pendekatan pembangunan yang menekankan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan serta pemerataan manfaat pembangunan. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap kegagalan model pembangunan konvensional yang cenderung menghasilkan ketimpangan. Menurut World Bank, pembangunan inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat. Hal ini didukung oleh penelitian dalam jurnal *World Development* yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif memiliki dampak lebih besar dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan pertumbuhan yang tidak merata (Ravallion, 2004). Asian Development Bank menegaskan bahwa pembangunan inklusif mencakup pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan

perlindungan sosial. Studi empiris dalam *Asian Development Review* menunjukkan bahwa negara dengan kebijakan inklusif cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah (Ali & Zhuang, 2007). Selain itu, konsep pembangunan inklusif juga sejalan dengan teori Amartya Sen yang menekankan pentingnya memperluas kemampuan individu. Penelitian dalam jurnal *Journal of Human Development* menunjukkan bahwa pembangunan yang berfokus pada peningkatan kapabilitas manusia lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan jangka panjang (Alkire, 2002). Konsep *pro-poor growth* juga memperkuat pembangunan inklusif, di mana pertumbuhan ekonomi harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi kelompok miskin. Studi dalam jurnal *Economic Journal* menunjukkan bahwa kebijakan yang pro-poor dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan (Dollar & Kraay, 2002). Dengan demikian, pembangunan inklusif merupakan pendekatan yang menekankan keadilan distribusi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Indikator Pembangunan

Indikator pembangunan merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara objektif. Indikator ini mencakup berbagai dimensi yang saling berkaitan. Menurut Badan Pusat Statistik, indikator pembangunan meliputi ekonomi, sosial, budaya, dan tata kelola.

Indikator Ekonomi

Indikator ekonomi digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi daerah, seperti PDRB, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan. Menurut Simon Kuznets, terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan yang dikenal sebagai *Kuznets Curve*. Penelitian dalam jurnal *American Economic Review* menunjukkan bahwa ketimpangan cenderung meningkat pada tahap awal pembangunan (Kuznets, 1955).

Indikator Sosial

Indikator sosial mencerminkan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), pembangunan manusia merupakan tujuan utama pembangunan. Studi dalam *Human Development Report* menunjukkan bahwa peningkatan IPM berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat (UNDP, 2020).

Indikator Budaya

Indikator budaya digunakan untuk mengukur pelestarian nilai-nilai budaya. Penelitian dalam jurnal *International Journal of Cultural Policy* menunjukkan bahwa pelestarian budaya dapat meningkatkan kohesi sosial dan identitas masyarakat (Throsby, 2010).

Indikator Tata Kelola

Indikator tata kelola mengukur kualitas pemerintahan. Menurut United Nations, *good governance* mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Studi dalam jurnal *Governance* menunjukkan bahwa tata kelola yang baik berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pembangunan (Kaufmann et al., 2010).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi dokumen terhadap berbagai sumber data sekunder, seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY Tahun 2025, data statistik pembangunan daerah, serta berbagai dokumen kebijakan terkait.

PEMBAHASAN

Identifikasi Indikator Pembangunan yang Belum Tercapai

Identifikasi indikator pembangunan yang belum tercapai merupakan langkah awal yang sangat penting dalam mengevaluasi kinerja pembangunan daerah. Proses ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD, dengan realisasi capaian yang dilaporkan dalam dokumen evaluasi, khususnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025. Indikator dikategorikan belum tercapai apabila nilai realisasinya berada di bawah target yang ditetapkan, atau capaian kinerjanya kurang dari 100%. Dalam perspektif evaluasi kebijakan publik, identifikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan, tetapi juga sebagai dasar untuk mengetahui adanya kesenjangan (*gap*) antara perencanaan dan implementasi. Kesenjangan tersebut mencerminkan adanya permasalahan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pembangunan. Oleh karena itu, analisis terhadap indikator yang belum tercapai harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai dimensi pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap data dalam LKPJ DIY Tahun 2025, terdapat beberapa indikator utama yang belum mencapai target. Indikator-indikator tersebut umumnya berkaitan dengan aspek pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, ketimpangan wilayah, pembangunan budaya, serta akses terhadap layanan dasar. Berikut penjelasan secara lebih mendalam:

Inclusive Growth Index (IGI)

Inclusive Growth Index (IGI) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pertumbuhan ekonomi mampu memberikan manfaat secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. IGI tidak hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhitungkan distribusi pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Capaian IGI DIY pada tahun 2025 sebesar 5,90 dari target 6,52 (90,49%) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya inklusif. Artinya, meskipun terjadi

peningkatan aktivitas ekonomi, manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Secara konseptual, kondisi ini sejalan dengan teori ketimpangan pembangunan yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahap awal cenderung hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, terutama yang memiliki akses terhadap modal dan sumber daya. Dalam konteks DIY, kelompok masyarakat di wilayah perkotaan cenderung lebih diuntungkan dibandingkan masyarakat di tingkat kalurahan. Ketidaktercapaian IGI juga mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan belum sepenuhnya mampu menjangkau kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, pekerja informal, dan masyarakat di wilayah terpencil. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif, seperti penguatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat desa.

Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan indikator utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Realisasi angka kemiskinan DIY sebesar 10,08% yang masih lebih tinggi dari target 9,66% menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan belum berjalan secara optimal. Kemiskinan di DIY memiliki karakteristik yang cukup kompleks, tidak hanya terkait dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan yang terjadi bersifat multidimensional. Dari sisi spasial, kemiskinan cenderung lebih tinggi di wilayah kalurahan dibandingkan wilayah perkotaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap infrastruktur, rendahnya produktivitas ekonomi, serta terbatasnya peluang kerja di wilayah pedesaan. Ketidaktercapaian target kemiskinan juga mencerminkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya efektif atau belum tepat sasaran. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya integrasi program, keterbatasan data, serta lemahnya koordinasi antar lembaga.

Indeks Williamson (Ketimpangan Wilayah)

Indeks Williamson digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam suatu daerah. Indikator ini sangat penting dalam menilai apakah pembangunan telah berjalan secara merata atau masih terpusat pada wilayah tertentu. Ketidaktercapaian indikator ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pembangunan antar wilayah di DIY, khususnya antara wilayah perkotaan dan kalurahan. Wilayah perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, sementara wilayah kalurahan masih menghadapi berbagai keterbatasan. Ketimpangan wilayah ini dapat berdampak pada perbedaan kualitas hidup masyarakat serta memperlambat proses pembangunan secara keseluruhan. Selain itu, ketimpangan juga dapat memicu migrasi penduduk dari desa ke kota, yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan baru di wilayah perkotaan. Dengan demikian, ketidaktercapaian Indeks Williamson menunjukkan perlunya kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi

pada pemerataan wilayah, seperti pembangunan infrastruktur desa dan penguatan ekonomi lokal.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pembangunan dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Di DIY, indikator ini memiliki peran penting mengingat budaya merupakan bagian dari identitas dan keistimewaan daerah. Capaian IPK yang belum memenuhi target menunjukkan bahwa pembangunan berbasis budaya belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya integrasi antara pembangunan ekonomi dan pelestarian budaya, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya. Selain itu, modernisasi dan globalisasi juga menjadi tantangan dalam pelestarian budaya, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang mampu mengintegrasikan budaya dalam pembangunan, seperti pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya.

Cakupan Layanan Dasar

Cakupan layanan dasar merupakan indikator yang mengukur akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, seperti air bersih, sanitasi, dan hunian layak. Realisasi sebesar 97,20% menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang belum mendapatkan layanan dasar secara memadai. Permasalahan ini umumnya terjadi di wilayah kalurahan yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas. Masih adanya rumah tidak layak huni, rendahnya akses sanitasi, serta keterbatasan layanan air bersih menjadi indikator bahwa pembangunan infrastruktur dasar belum sepenuhnya merata. Kondisi ini memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, terutama dalam aspek kesehatan dan produktivitas. Oleh karena itu, peningkatan layanan dasar menjadi prioritas penting dalam pembangunan daerah.

Indikator Program dan Pelayanan Publik

Selain indikator makro, terdapat pula indikator program yang belum mencapai target, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di tingkat kalurahan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, kapasitas aparatur, serta koordinasi antar lembaga.

Tingkat Capaian Indikator Berdasarkan Data Empiris

Analisis tingkat capaian indikator pembangunan merupakan bagian penting dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah. Pengukuran capaian dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan realisasi yang dicapai pada tahun berjalan. Perbandingan ini menghasilkan persentase capaian yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan program pembangunan. Berdasarkan data empiris tahun 2025, tingkat capaian indikator pembangunan

di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa sebagian besar indikator berada pada kategori mendekati target, namun belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini terlihat dari adanya selisih (gap) antara target dan realisasi pada beberapa indikator utama, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Inclusive Growth Index (IGI)	6,52	5,90	90,49%
2	Kemiskinan	9,66%	10,08%	95,65%
3	Layanan Dasar	100%	97,20%	97,20%
4	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	74,98	±71,04	94,74%

Analisis Capaian Inclusive Growth Index (IGI)

Capaian IGI sebesar 90,49% menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di DIY telah berjalan dengan cukup baik, namun belum sepenuhnya inklusif. Selisih antara target dan realisasi mencerminkan bahwa distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi masih belum merata. Secara empiris, kondisi ini dapat diinterpretasikan bahwa sebagian besar pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di wilayah atau kelompok tertentu, terutama di wilayah perkotaan. Sementara itu, masyarakat di tingkat kalurahan belum sepenuhnya merasakan dampak positif dari pertumbuhan tersebut. Dalam konteks ini, capaian IGI yang belum optimal menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan masih perlu diarahkan pada peningkatan pemerataan ekonomi, bukan hanya pada peningkatan pertumbuhan semata.

2. Analisis Capaian Angka Kemiskinan

Indikator kemiskinan menunjukkan capaian sebesar 95,65%, yang berarti realisasi angka kemiskinan masih lebih tinggi dibandingkan target. Meskipun selisihnya relatif kecil, kondisi ini tetap menunjukkan bahwa target pengurangan kemiskinan belum tercapai. Dari sudut pandang empiris, hal ini mengindikasikan bahwa program penanggulangan kemiskinan telah berjalan, namun belum cukup efektif dalam menurunkan angka kemiskinan sesuai target. Kemiskinan yang bersifat struktural, seperti keterbatasan akses terhadap pekerjaan dan pendidikan, menjadi faktor yang sulit diatasi dalam jangka pendek. Selain itu, capaian ini juga menunjukkan bahwa terdapat kelompok masyarakat yang masih berada dalam kondisi rentan, sehingga mudah kembali jatuh ke dalam kemiskinan. Dengan demikian, meskipun capaian mendekati target, permasalahan kemiskinan masih menjadi isu krusial dalam pembangunan daerah.

3. Analisis Capaian Layanan Dasar

Capaian layanan dasar sebesar 97,20% menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah mendapatkan akses terhadap layanan dasar, seperti air bersih, sanitasi, dan hunian layak. Namun, belum tercapainya target 100% menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang belum terlayani. Dari perspektif empiris, sisa persentase yang

belum tercapai tersebut umumnya berada di wilayah yang sulit dijangkau, seperti daerah pedesaan atau kalurahan dengan keterbatasan infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penyediaan layanan dasar bukan hanya pada kuantitas, tetapi juga pada pemerataan akses. Meskipun capaian ini tergolong tinggi, dalam konteks pembangunan, target layanan dasar idealnya adalah 100%, karena berkaitan langsung dengan hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, selisih kecil sekalipun tetap memiliki implikasi yang signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat.

4. Analisis Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Capaian IPK sebesar 94,74% menunjukkan bahwa pembangunan di bidang kebudayaan telah berjalan dengan cukup baik, namun belum mencapai target yang diharapkan. Selisih ini mengindikasikan bahwa upaya pelestarian dan pengembangan budaya belum sepenuhnya optimal. Secara empiris, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya integrasi antara kebijakan budaya dengan pembangunan ekonomi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya. Selain itu, pengaruh globalisasi juga dapat menggeser minat masyarakat terhadap budaya lokal. Dalam konteks DIY yang memiliki identitas budaya yang kuat, capaian IPK yang belum optimal menjadi perhatian penting karena budaya merupakan salah satu pilar utama pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Ketidaktercapaian beberapa indikator pembangunan kalurahan dan kelurahan di DIY tahun 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan dan pembangunan daerah belum sepenuhnya bersifat inklusif. Faktor ekonomi, sosial, infrastruktur, tata kelola, dan administratif menjadi penyebab utama belum optimalnya capaian pembangunan. Kondisi tersebut berdampak pada masih tingginya kemiskinan, ketimpangan wilayah, dan rendahnya kualitas hidup sebagian masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola pembangunan berbasis data, peningkatan kapasitas kelembagaan, pemerataan infrastruktur, serta perluasan partisipasi masyarakat guna mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan di tingkat kalurahan dan kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkire, S. (2002). Dimensions of human development. *World Development*, 30(2), 181–205.
- Ali, I., & Zhuang, J. (2007). Inclusive growth toward a prosperous Asia: Policy implications. *Asian Development Review*, 24(1), 1–18.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam angka 2025*. Yogyakarta: BPS DIY.
- Cypher, J. M., & Dietz, J. L. (2009). *The process of economic development* (3rd ed.). New York: Routledge.
- Dollar, D., & Kraay, A. (2002). Growth is good for the poor. *Journal of Economic Growth*, 7(3), 195–225.

- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues. *Governance*, 23(2), 220–246.
- Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *American Economic Review*, 45(1), 1–28.
- Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2025). *Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY tahun 2025*. Yogyakarta.
- Ravallion, M. (2004). Pro-poor growth: A primer. Washington, DC: World Bank.
- Rostow, W. W. (1960). *The stages of economic growth: A non-communist manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. New York: Alfred A. Knopf.
- Throsby, D. (2010). *The economics of cultural policy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Boston: Pearson.
- United Nations Development Programme. (2020). *Human development report 2020*. New York: UNDP.
- World Bank. (2018). *Inclusive growth and shared prosperity*. Washington, DC: World Bank.